

## DAFTAR PUSTAKA

- Tumanggor, A. H. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 251-258.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi Offset. Yogyakarta.
- Pratama, R. A. 2019. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03./2018, *tentang melaporkan PPh 21 dengan sistem online*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2017, *tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, *tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, *tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta.